

# **PERUBAHAN RENJA**

## **(RENCANA KERJA – TH. 2022)**

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**



**Jl. Raja Haji No.09 -10 Sekupang – Batam Telp. 0778 321370**

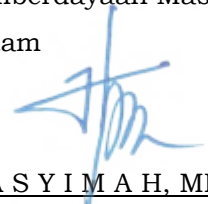
## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamiin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 telah tersusun. Rencana Kerja ini memuat tentang gambaran umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Visi dan Misi serta Kondisi Pembangunan Bidang Urusan Sosial serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, baik perkiraan permasalahan yang dihadapi maupun rencana upaya penanganannya.

Rencana Kerja ini sangat diperlukan karena disamping memuat informasi prioritas pembangunan juga program maupun kegiatannya. Hal ini sebagai pedoman dalam memberi arah penanganan pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial, Pemberdayaan Masyarakat serta upaya meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki dan memperbaharui hasil-hasil ja pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, disesuaikan dengan Rancangan Kinerja dan forum OPD tahun 2021, apakah ada usulan-usulan di dalam Forum OPD yang perlu di masukan kedalam Renja OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja ini. Semoga Renja ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial maupun masyarakat pada umumnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan anugerah-Nya bagi kita semua. Aamiin...

Batam, Agustus 2022  
Kepala Dinas Sosial Dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota  
Batam

  
HASYIMAH, MM  
NIP.19630607 198606 2 003

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM</b> .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .....	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	37
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	38
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023 .....	41
3.3. Program Dan Kegiatan Renja Dinas Sosial .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah rancangan renja selesai dan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD beserta hasil musrenbang tingkat kota. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

# **PERUBAHAN RENJA**

## **(RENCANA KERJA – TH. 2022)**

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**



**Jl. Raja Haji No.09 -10 Sekupang – Batam Telp. 0778 321370**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil' alamiin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 telah tersusun. Rencana Kerja ini memuat tentang gambaran umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Visi dan Misi serta Kondisi Pembangunan Bidang Urusan Sosial serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, baik perkiraan permasalahan yang dihadapi maupun rencana upaya penanganannya.

Rencana Kerja ini sangat diperlukan karena disamping memuat informasi prioritas pembangunan juga program maupun kegiatannya. Hal ini sebagai pedoman dalam memberi arah penanganan pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial, Pemberdayaan Masyarakat serta upaya meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki dan memperbaharui hasil-hasil ja pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, disesuaikan dengan Rancangan Kinerja dan forum OPD tahun 2021, apakah ada usulan-usulan di dalam Forum OPD yang perlu di masukan kedalam Renja OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja ini. Semoga Renja ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial maupun masyarakat pada umumnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan anugerah-Nya bagi kita semua. Aamiin...

Batam,           Agustus 2022  
Kepala Dinas Sosial Dan  
Pemberdayaan Masyarakat Kota  
Batam

H A S Y I M A H, MM  
NIP.19630607 198606 2 003

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM</b> .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam .....	9
2.2. Analsis Kinerja Pelayana Dinas Sosial .....	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	37
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	38
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023 .....	41
3.3. Program Dan Kegiatan Renja Dinas Sosial .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	68

sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Nasional kita. Bidang yang sangat penting, karena kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang fokus sasarannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta penataan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin.

Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan Sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kota Batam hasil dari beberapa forum musyawarah perencanaan pembangunan salah satunya adalah dari forum OPD. Forum OPD merupakan salah satu forum penyerapan aspirasi masyarakat dimana di dalamnya terdapat berbagai unsur sesuai urusan bidang masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang mengacu kepada hasil Forum OPD dan



pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang RI nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Palawan, Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02)
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026

29. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016, Tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
30. Peraturan Walikota Batam Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam Tahun 2022.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra;
- b. Menjadikan Rancangan awal Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;
- c. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2023;

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2022 melalui analisis terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Riview terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

Jumlah pagu anggaran Tahun 2022 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.32.535.008.00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.14.606.763.339.00 atau sebesar 44,62%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp.18.128.844.459.00 atau 55,38%.

Dalam penganggaran tahun 2022 ini nama program dan kegiatan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan indikator kinerja disusun mengikuti program dan Kegiatan yang baru. Dinas Sosial melaksanakan 8 Program 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun dapat dilihat pada Tabel II.1-1 sebagai berikut:

**Tabel II.1-1 (Tabel T-C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra**  
**Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**KOTA BATAM**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (out comes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
						Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12	12=(5+7+9)	13=(10/4)
1	Urusan	:	<b>Sosial</b>											
1 01	Bidang	:	<b>Penanganan Fakir Miskin</b>											
1 01 01	Program	:	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT,BST)</b>										
1 01 01 01	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	60108	20000	60108	47054	78%	60108	47054	78%	60108	
1	Urusan	:	<b>Sosial</b>											



1 01	Bidang	:	<b>Rehabilitasi Sosial</b>												
1 01 02	Program	:	<b>Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;</b>											
1 01 02 01	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;</b> 1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi;	1. 8,5% (65/767); 2. 50% (100/200); 3. 71,4% (250/350); 4. 56,5% (61/108)	1. 8,5% (65/767); 2. 50% (100/200); 3. 71,4% (250/350); 4. 56,5% (61/108)	1. 8,7% (65/267); 2. 50% (100/200); ; 3. 71,4% (250/350); ; 4. 56,5% (61/108)	1. 22 2. 255 3. 725 4. 70	1. 15% 2. 42% 3. 100% 4. 108%	1. 9.6% (74/767); 2. 60% (120/200); ; 3. 71,4% (250/350); ; 4. 56,5% (61/108);	1. 22 2. 255 3. 725 4. 70	1. 15% 2. 42% 3. 100% 4. 108%	1. 9.6% (74/767); 2. 60% (120/200); ; 3. 71,4% (250/350); ; 4. 56,5% (61/108);		
1	Urusan	:	<b>Sosial</b>												
1 01	Bidang	:	<b>Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial</b>												
1 01 03	Program	:	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>											

1 01 03 01	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	1000	800	800	582	73%	800	582	73%	700		
1	Urusan	:	<b>Sosial</b>												
1 01	Bidang	:	<b>Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial</b>												
1 01 04	Program	:	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>											
1 01 04 01	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	89.66%	0%	0%	0	0	0%	0	0	89.66%		
1	Urusan	:	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>												
1 01	Bidang	:	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>												
1 01 05	Program	:	<b>Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya											
1 01 05 01	Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	36	12	12	10	83%	12	10	83%	24		

1	Urusan	:	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>												
1 01	Bidang	:	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>												
1 01 06	Program	:	<b>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif											
1 01 06 01	Kegiatan	:	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	94.16%	97.1%	97.1%	97.1%	97.1%	97.1%	97.1%	97.1%	100%	

1			2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
1	Urusan	:	<b>Non Urusan</b>												
1 01	Bidang	:	<b>Sekretariat</b>												
1 01 01	Program	:	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>											

1 01 01 01	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	0	2	0	0	2	0	0	2		
1 01 01 01	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 01 01 01	Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 01 01 01	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 01 01 01	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 01 01 01	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Pemerintahan Daerah												
1 01 01 01	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.2-1 (Tabel T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinsos						Realisasi Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	1.Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;			63.64%	67.62%	72.73%	81.82%	90.91%	19%	100%	69%	
	2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;			16.57%	22.86%	34.29%	81.82%	58.06%	69.49%			
3	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT,BST)			95,58% (57.450) 1. 0 mahasiswa; 2. 0 fasilitator; 3. 0 petugas	100% (60.108) 1. 6 mahasiswa; 2. 0 fasilitator; 3. 0 petugas	100% (60.108) 1. 6 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 18 petugas (6 puskessos)	100% (60.108) 1. 8 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 18 petugas (6 puskessos)	100% (60.108) 1. 8 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 24 petugas (8 puskessos)	100% (60.108) 1. 8 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 30 petugas (10 puskessos)	95.53% (57.420)	100 % (60.108)	
4.	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana			0%	89,66%	89,66%	89,66%	93,10%	93,10%	0%	100%	

6	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya			37.50%	56.25%	75.00%	93.75%	93.75%	100.00%	23.44%	23.44%	
7	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif			93.55%	94.44%	97.55%	98.44%	99.22%	100.00%	93.55%	93.55%	



### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, APBN masih terbatas untuk melakukan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah. Disisi lain

partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.



**Gambar I**  
**Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya**

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat tercapai dengan baik. Tiga isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang, ketiga isu tersebut yaitu :

1. Masalah Optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Masih belum Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Masyarakat;
3. Masih belum Optimalnya Pelayanan Penunjang;

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinsospm Kota Batam dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos kerja yang baik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Bidang Sosial nasional secara umum dan Kesejahteraan masyarakat Kota Batam khususnya.

Beberapa factor penyebab belum optimalnya pencapaian fungsi tersebut diatas sehingga menjadi isu strategis antara lain karena :

- a. Masih terbatasnya dan minimnya sumber daya manusia Sosial yang bersifat pegawai tetap yang ada saat ini terutama yang berlatar belakang Pekerja Sosial;
- b. Masih kurang optimalnya pemberian pelayanan secara prima karena pemahaman dan rasa pengabdian yang kurang;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sosial yang sesuai tuntutan teknologi terkini;
- d. Belum tercapainya standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan;
- e. Kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur;

- f. Belum memadai system manajemen dan pengendalian mutu;
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana fisik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Belum memadainya pengelolaan asset
- i. Belum efektifnya system pelayanan penunjang;
- j. Belum terpenuhinya SDM yang berkualitas;

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel II.4 - 1 berikut ini :

**TABEL II.4 - 1 (Tabel T-C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 202**  
**KOTA BATAM**

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
					(Rp. )					(Rp. )	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>20,492,522,972</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>19,373,790,065</b>	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	13,165,258,790	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	11,012,661,465	
1.1	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</b>	<b>2 Dokumen</b>	71,628,062	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</b>	<b>2 Dokumen</b>	60,875,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	71,628,062	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60,875,000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9,913,724,755	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,620,042,917	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	40 Orang	9,774,080,755	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	40 Orang	8,514,622,917	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	13 Kegiatan	139,644,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	13 Kegiatan	105,420,000	

1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100%	100,000,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100%	100,502,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	100,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	100,502,000
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	399,227,496	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	196,638,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12,008,970	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8,898,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	55,103,077	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	57,204,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	36,478,757	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37,116,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	2 Paket	21,727,572	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,845,000

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,861,920	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,800,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	272,047,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	51,775,000
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>806,870,070</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	161,039,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	21,268,298	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	74,355,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	85,601,772	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	86,684,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-

1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	1,276,296,557	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	1,191,862,048	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	403,649,360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	366,585,600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	872,647,197	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	825,276,448	
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	100%	597,511,850	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	100%	681,702,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	83,745,024	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80,960,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	165,300,223	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	230,229,000	



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	78,666,120	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	87,140,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98,783,131	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176,873,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( UPT Nilam Suri )		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	171,017,352	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( UPT Nilam Suri )		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106,500,000
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>1,958,661,757</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>4,280,000,000</b>
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase PSKS yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,958,661,757</b>	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase PSKS yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>4,280,000,000</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan KapasitasPekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	1,378,251,498	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan KapasitasPekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	1,690,000,000

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	493,970,024	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	2,245,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	220,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	86,440,235	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	125,000,000	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;	<b>72,73%</b> <b>34,29%</b>	<b>2,623,651,750</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;	72,73% 34,29%	2,162,731,000	

3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	1. 10.3% (79/767); 2. 75% (150/200); 3. 71,4% (250/350); 4. 92.6% (100/108)	2,623,651,750	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	1. 10.3% (79/767); 2. 75% (150/200); 3. 71,4% (250/350); 4. 92.6% (100/108)	2,162,731,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	183,505,404	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	145,150,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	731,029,399	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	690,000,000

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	1,099,147,554	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	585,000,000
	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	136,433,739	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	100,000,000
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	110,000,000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	93,081,000
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	363,535,654	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	294,500,000

	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	255,000,000
4.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT, BST)</b>	<b>78,68%</b>	<b>2,113,426,275</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT, BST)</b>	<b>78,68%</b>	<b>949,365,000</b>
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu</b>	<b>100%</b>	<b>2,113,426,275</b>	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		<b>Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu</b>	<b>100%</b>	<b>949,365,000</b>
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	28710 Orang	2,091,517,627	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	28710 Orang	880,000,000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Mahasiswa	21,908,648	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Mahasiswa	69,365,000
5.	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>100%</b>	<b>371,157,822</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>100%</b>	<b>594,131,100</b>

5.1	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>	100%	371,157,822	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>	100%	454,131,100
	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	371,157,822	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	454,131,100
5.2	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>	100	0	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>	100	140,000,000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	140,000,000
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>	89,56%	260,366,578	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>	89,56%	374,901,500
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		<b>Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara</b>	89,66%	260,366,578	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		<b>Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara</b>	89,66%	374,901,500

	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana		Jumlah Sarana dan prasarana yang di rehabilitasi	1 Unit	77,573,617	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana		Jumlah Sarana dan prasarana yang di rehabilitasi	0	0
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	41 Makam	109,309,185	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	41 Makam	302,561,500
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	73,483,776	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	72,340,000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				17,697,863,628	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				18,616,652,600
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>75%</b>	<b>216,172,656</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>	<b>75%</b>	<b>254,000,000</b>
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		<b>Jumlah kelurahan yang berprestasi</b>	<b>36 Kelurahan</b>	<b>216,172,656</b>	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		<b>Jumlah kelurahan yang berprestasi</b>	<b>36 Kelurahan</b>	<b>254,000,000</b>
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	216,172,656	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	254,000,000

8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		% lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif		17,481,690,972	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		% lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif		18,362,652,600
8.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi		17,481,690,972	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi		18,362,652,600
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	190,165,647	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	145,000,000



	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	681 Lembaga	16,009,525,325	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	681 Lembaga	17,677,752,850
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah peserta pelatihan kelembagaan kemasyarakatan	460 Lembaga	300,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah peserta pelatihan kelembagaan kemasyarakatan	460 Lembaga	0
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jmlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi sarana dan prasarananya	89 Lembaga	300,000,000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jmlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi sarana dan prasarananya	89 Lembaga	0
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan BBGRM	400 Peserta	200,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan BBGRM	400 Peserta	168,221,250

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi	1 Lembaga	482,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi	1 Lembaga	371,678,500
	<b>Jumlah</b>		38,190,386,600		<b>JUMLAH</b>		37,990,442,665.00

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Proses pengusulan dalam kegiatan dan program di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diawali dengan merangkum semua usulan dari Bidang-bidang, UPT dan penunjang yang mendukung semua operasional pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat. Dihimpun dari pertengahan tahun hingga akhir tahun dan dikompilasi menjadi rancangan awal Renja OPD Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat 2022. Dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dukungan anggaran.

Proses pengusulan ini juga tetap mempertimbangkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, tetap mendukung program Penanganan PMKS dan Kemiskinan nasional yang berpihak pada rakyat.

Melakukan beberapa perjanjian kerjasama pelayanan Sosial dengan beberapa sektor swasta dan pemerintah daerah Provinsi Kepri yang bersifat periodik tahunan untuk pelayanan Sosial rujukan yang lebih baik.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan juga dianggap menjadi hal yang sangat penting agar pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar dan tidak ada yang menyimpang dari aturan baik oleh karena human error maupun oleh kesalahan lain.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam periode 2021 - 2026 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kepulauan Riau dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Batam ke Propinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya secara nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan Provinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Sosial, baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Kota Batam sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2021-2026 dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan baik ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota. Tujuan selanjutnya dapat mensejahterakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Umumnya.

**TABEL III.1 - 1**  
**Strategi, Kebijakan Dan Program**

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Meningkatkan pemberdayaan sosial melalui pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang meliputi TKSK dan PKH	Meningkatkan Kemampuan Potensi TKSK dan PKH dalam pendataan dan pendampingan sosial.	Pemberdayaan Sosial
2.	Mengoptimalkan pelayanan/upaya rehabilitasi sosial thdp Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi rehabilitasi PPKS melalui reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, dan spirual, serta layanan kedaruratan dan rujukan bagi PMKS;	Rehabilitasi Sosial
3	Kesediaan data yang akurat tentang DTKS ( Penduduk Miskin)	Pendataan dan pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Miskin / Pra Sejahtera	Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Meningkatnya pemahaman kerawanan bencana di lingkungan masyarakat dan meningkatnya	Peningkatan dan Optimalisasi SDM melalui program tanggap bencana dan meningkatnya pelayanan terhadap	Penanganan Bencana

	kewaspadaan tanggap darurat bencana	Korban Bencana	
5	Tersedianya Taman Makam Pahlawan yang Memenuhi standar	Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6	Meningkatkan pengelolaan administrasi Kelurahan	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan dalam pelaksanaan lomba kelurahan	Administrasi Pemerintahan Desa
7	Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan dengan pemberian insentif kepada kader posyandu	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM TAHUN 2022**

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

#### **VISI**

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

#### **MISI**

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



Dinas Sosial berada dalam misi ke 3 (Tiga) yaitu *Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak Mulia.*

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

**Tabel III.2 – 1  
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS SOSIAL TA 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan pelayanan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial / PPKS		Persentase penurunan PMKS/PPKS
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	% PPKS yang direhab dan dientaskan
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	% PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial
Meningkatkan pemberdayaan/kapasitas kelembagaan masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan		% kelurahan aktif dan baik



	Meningkatnya kelurahan dengan administrasi pemerintahan yang baik	% kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik
	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	% kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL

Program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2023 sudah mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 yang telah mulai dilakukan pada awal tahun 2022 yang direncanakan berjumlah 2 (dua) Urusan, 8 (Delapan) Program Perangkat Daerah, 15 (lima belas) Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.3. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum
    - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5. Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
- 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
  - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ( UPT Nilam Suri )

2. Program Pemberdayaan Sosial
  - 2.1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2.1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
  
3. Program Rehabilitasi Sosial
  - 3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
    - 3.1.1. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
    - 3.1.3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
    - 3.1.4. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
    - 3.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
  
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- 4.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 4.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 4.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Program Penanganan Bencana
  - 5.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
    - 5.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
  - 5.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
    - 5.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan
  - 6.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - 6.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - 6.1.2. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
  - 7.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    - 7.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
  - 8.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 8.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 8.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 8.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 8.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 8.1.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- 8.1.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



**TABEL III.3.1 (TC-33)**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN**  
**2023**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Perubahan Renja 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>		100%	10,616,771,590	APBD		100%	11,012,661,465
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kota Batam	100%	-			100%	60,875,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	8,774,042,152			100%	8,620,042,917
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	-			100%	100,502,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	156,134,390			100%	196,638,500

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	115,710,000			100%	161,039,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	1,208,052,048			100%	1,191,862,048
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	362,833,000			100%	681,702,000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</b>		<b>100%</b>	<b>1,861,865,515</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>4,280,000,000</b>
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	Kota Batam	100%	1,861,865,515			100%	4,280,000,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;</b>		<b>100%</b>	<b>2,139,000,550</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>2,162,731,000</b>



	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	Kota Batam	100%	2,139,000,550			100%	2,162,731,000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT, BST)</b>		<b>100%</b>	<b>1,543,265,285</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>949,365,000</b>
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	Kota Batam	100%	1,543,265,285			100%	949,365,000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>		<b>100%</b>	<b>500,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>594,131,100</b>
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	Kota Batam	100%	500,000,000			100%	454,131,100

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	Kota Batam	100%	0			100%	140,000,000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>246,546,415</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>374,901,500</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	Kota Batam	100%	246,546,415			100%	374,901,500
<b>7</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya</b>		<b>100%</b>	<b>98,869,620</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>254,000,000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	Kota Batam	100%	98,869,620			100%	254,000,000
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>% lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif</b>		<b>100%</b>	<b>15,528,689,150</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>18,362,652,600</b>

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Kota Batam	100%	15,528,689,150		100%	18,362,652,600
Total				32,535,008,125	Total		37,990,442,665

**TABEL III.3.2 (TC-34)**  
**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2022**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/(OUT COME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
01.01.6	SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34,426,910,869	32,535,008,125	RASIONALISASI ANGGARAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				18,765,956,719	16,907,449,355	RASIONALISASI ANGGARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tepenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	0 %	11,788,709,824	10,616,771,590	RASIONALISASI ANGGARAN

		<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu</b>	2 Dokumen	0 Dokumen	<b>69,246,000</b>	-	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	69,246,000	-	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>9,584,033,986</b>	<b>8,774,042,152</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	40 orang	9,449,033,986	8,664,842,152	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 kegiatan	13 Dokumen	135,000,000	109,200,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>					RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan pakaina dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Orang	63 Orang	0	-	RASIONALISASI ANGGARAN

		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>385,950,790</b>	<b>156,134,390</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	1 Paket	11,609,600	11,609,600	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	4 Paket	53,270,570	53,798,670	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Paket	35,265,620	35,265,620	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	2 Paket	21,005,000	42,307,500	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1 Paket	1,800,000	1,800,000	RASIONALISASI ANGGARAN

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kali	2 Laporan	263,000,000	11,353,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang teenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>103,316,000</b>	<b>115,710,000</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1 paket	20,561,000	65,000,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Jenis	5 unit	82,755,000	50,710,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang teenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,233,852,048</b>	<b>1,208,052,048</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jenis	4 Laporan	390,225,600	364,425,600	RASIONALISASI ANGGARAN

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	12 Laporan	843,626,448	843,626,448	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>412,311,000</b>	<b>362,833,000</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	80,960,000	80,960,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	159,803,000	159,803,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	76,050,000	57,850,000	RASIONALISASI ANGGARAN



		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	95,498,000	64,220,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit			RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,893,524,515</b>	<b>1,861,865,515</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,893,524,515</b>	<b>1,861,865,515</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Pendamping PKH	102 Orang	1,332,416,375	1,300,757,375	RASIONALISASI ANGGARAN

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 TKSK	3 Lembaga	477,542,560	477,542,560	RASIONALISASI ANGGARAN
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Pengurus	20 Sertifikat	83,565,580	83,565,580	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1 Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2 Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;</b>	<b>1 6762 % 2 2286 %</b>	<b>1 6762 % 2 2286 %</b>	<b>2,430,057,765</b>	<b>2,139,000,550</b>	RASIONALISASI ANGGARAN

		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2 Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3 Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4 Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	1 96% (74/767); 2 60% (120/200); 3 714% (250/350); 4 565% (61/108)	1 96% (74/767); 2 60% (120/200); 3 714% (250/350); 4 565% (61/108)	2,430,057,765	2,139,000,550	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	30 Orang	177,402,750	99,252,750	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	351,445,915	329,205,915	RASIONALISASI ANGGARAN

		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	255 Orang	360 Orang	311,045,385	311,045,385	RASIONALISASI ANGGARAN
		UPTD Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	UPTD Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	751,548,925	724,869,700	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	706,718,290	618,488,300	RASIONALISASI ANGGARAN

		Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10 Orang	131,896,500	56,138,500	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH BPNT BST)</b>	<b>7835 %</b>	<b>7835 %</b>	<b>2,043,142,185</b>	<b>1,543,265,285</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2,043,142,185</b>	<b>1,543,265,285</b>	RASIONALISASI ANGGARAN
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Keluarga	6 Keluarga	21,180,055	21,180,055	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	60108 KK	60108 Keluarga	2,021,962,130	1,522,085,230	RASIONALISASI ANGGARAN

				Fakir Miskin Kabupaten/Kota					
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>358,814,600</b>	<b>500,000,000</b>	<b>RASIONALISASI ANGGARAN</b>
		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>358,814,600</b>	<b>500,000,000</b>	<b>RASIONALISASI ANGGARAN</b>
		Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1000 Orang	358,814,600	500,000,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana</b>	<b>8966 %</b>	<b>8966 %</b>	<b>251,707,830</b>	<b>246,546,415</b>	<b>RASIONALISASI ANGGARAN</b>

		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara</b>	<b>8966 %</b>	<b>8966 %</b>	<b>251,707,830</b>	<b>246,546,415</b>	<b>RASIONALISASI ANGGARAN</b>
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Paket Pagar dan Taman	2 Dokumen	74,993,830	69,832,415	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Teenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	21 Makam Pahlawan dan Veteran	21 Makam	105,674,000	105,674,000	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Orang	12 laporan	71,040,000	71,040,000	RASIONALISASI ANGGARAN

1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				15,869,937,770	15,627,558,770	RASIONALISASI ANGGARAN
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	5625 %	5625 %	208,983,620	98,869,620	RASIONALISASI ANGGARAN
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berestasi	12 Kelurahan	12 Kelurahan	208,983,620	98,869,620	RASIONALISASI ANGGARAN
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kelurahan	3 Dokumen	208,983,620	98,869,620	RASIONALISASI ANGGARAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	9444 %	9444 %	15,660,954,150	15,528,689,150	RASIONALISASI ANGGARAN



		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>15,660,954,150</b>	<b>15,528,689,150</b>	<b>RASIONALISASI ANGGARAN</b>
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30 TTG	3 Laporan	183,841,500	135,606,500	RASIONALISASI ANGGARAN

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3908 Kader	604 Lembaga	15,477,112,650	15,393,082,650	RASIONALISASI ANGGARAN
--	--	--	--	---	------------	-------------	----------------	----------------	------------------------

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2022.

Rencana kerja yang dibuat merupakan rekapitulasi dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang disusun oleh Bidang, UPTD dan Sekretariat terkait dilingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang didalam setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat Dinas Sosial memiliki tugas menyusun program kerja Bidang, UPTD dan Sekretariat, sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang berkesinambungan dan berstruktur sebagai perwujudan perencanaan partisipasif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebenarnya lebih banyak kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun banyak juga kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan dana sehingga indikator program tidak dapat tercapai.

Akhir kata kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam

menunjang program kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kedepannya.

Batam, Agustus 2022  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA  
BATAM



**HASYIMAH, MM**  
NIP. 19630607 198606 2 003

LAMPIRAN Tabel 3.3

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Batam TA. 2022